BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Akuntabilitas Keuangan (X_2) Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Sumber data utama pada penelitian ini adalah berupa kuesioner yang disebar kepada 38 responden yang merupakan Pegawai Keuangan di Dinas dan SKPD Kota Cimahi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) terdiri dari 6 pernyataan dari 4 indikator.

b) Variabel Akuntabilitas Keuangan (X_2) terdiri dari 3 pernyataan dari 3 indikator.

c) Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) terdiri dari 4 pernyataan dari 4 indikator.

Data yang telah dikumpulkan lalu dilakukan pengolahan dengan melakukan pengkodean/*coding* dan diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tiap variabel, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Akuntabilitas Keuangan (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sebelum masuk ke pembahasan hasil analisis deskriptif dan verifikatif, terlebih dahulu dikelompokan jumlah responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

4.1.1 Karakteristik Responden

Data responden dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar latar belakang responden yang dapat dijadikan masukan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, adapun responden yang berhasil terkumpul dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 responden.

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden merupakan merupakan Pegawai Keuangan di Dinas dan SKPD Kota Cimahi.

Tabel 4.1
Response Rate

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	38
Kesioner tidak kembali	5
Kuesioner kembali	33
Tingkat Pengembalian (*Response Rate)*	**87%**

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 87%, angka tersebut didapat dari perhitungan persentase kesioner yang kembali (33 kuisioner) dibagi dengan kesioner yang disebarkan (38 kuisioner). Tingkat pengembalian kesioner (*Response Rate*) sebesar 87% termasuk criteria yang *Exellent* (sangat baik), artinya tingkat pengembalian kesioner dapat diterima dan hasil tanggapan responden dapat diolah lebih lanjut karena *response rate* lebih besar dari kriteria *Acceptable* (dapat diterima) yaitu 60-69%, (Yang dan Miller 2008:231).

Kuisioner 5 buah tidak kembali dikarenakan 4 kuisioner ditahan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dan 1 kuisioner hilang di Dinas Tenaga Kerja.

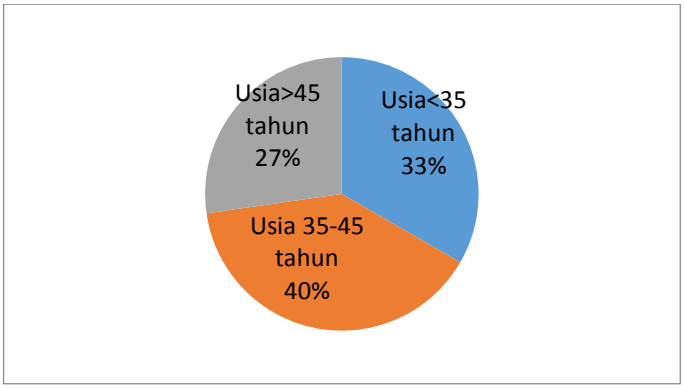
4.1.1.1 Profil Responden Berdasarkan Usia

Profil jumlah responden berdasarkan umur responden yang merupakan Pegawai Keuangan di Dinas SKPD kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Rentan Usia	Frekuensi	Persentase
<30	11	33,33%
30-40	13	39,39%
>40	9	27,27%
Total		**100%**

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017



Gambar 4.1
Gambaran Jumlah Responden Berdasarkan Rentan Usia

Dari tabel 4.2 dapat dilihat jumlah responden rentan usia 30-40 tahun ada sebanyak 13 (39%), lalu usia >40 ada 9 responden (27%) sedangkan untuk usia <30 ada 11 responden (33%).

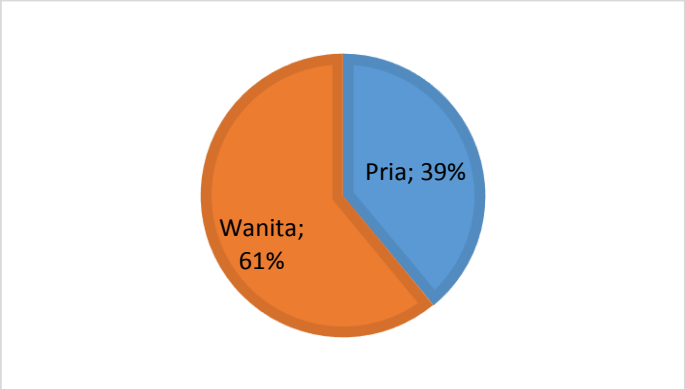
4.1.1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada jumlah responden pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	13	39,39%
Wanita	20	60,6%
Total		100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah 2017



Gambar 4.2
Gambaran Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Tabel 4.3 di atas menunjukan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Dari diagram di atas terlihat jumlah responden cenderung lebih banyak responden wanita, dari total 33 responden 20 diantaranya adalah responden wanita (61%) dan sisanya 13 responden pria (39%).

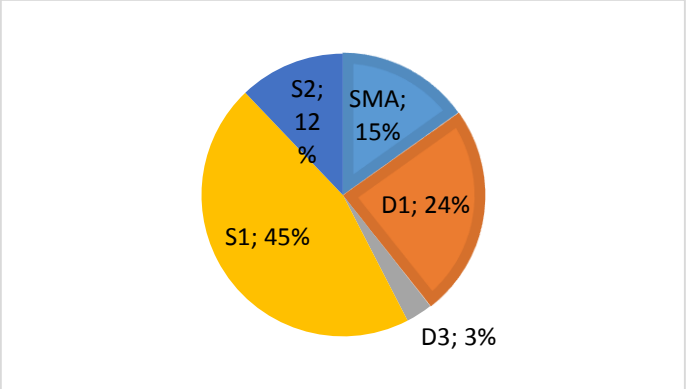
4.1.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	5	15,15%
D1	8	24,24%
D3	1	3,33%
S1	15	45,45%
S2	4	12,12%
Total		100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah 2017



Gambar 4.3
Gambaran Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

Pada Tabel 4.5 di atas menunjukan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dari diagram di atas terlihat jumlah responden cenderung lebih banyak pada responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 15 responden (45%), lalu S2 sebanyak 4 (12%) responden, D3 sebanyak 1 (3%) responden, D1 sebanyak 8 (24%) dan SMA 5 (15%) Responden.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Kuesioner terdiri dari 13 butir pernyataan dengan perincian 6 butir pernyataan mengenai

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 3 butir pernyataan mengenai Akuntabilitas Keuangan dan 4 butir pernyataan tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *structural equation modeling* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pengukuran, pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan pihak eksternal instansi pemerintah.

Yang menjadi indikator untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada penelitian ini adalah Pengidentifikasian, Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

No. Kuesioner	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Pengidentifikasian	146	165	88.5%	Sangat Baik
2	Pengukuran	100	165	60.6%	Cukup
3		101	165	61.2%	Cukup

4	Pencatatan	125	165	75.8%	Baik
5		115	165	69.7%	Baik
6	Pelaporan	79	165	47.9%	Kurang
Total		**666**	**990**	**67.3%**	**Cukup**

Sumber: Data primer sudah diolah 2017

Pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat rata-rata persentase tanggapan untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 67.3%, menurut tabel 3.4 angka tersebur termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01%-68,00%. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 32.3%. Gap sebesar 32% ini menunjukan penyebab Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) pada SKPD di Kota Cimahi belum mencapai tingkat ideal, terutama pada indikator Pelaporan.

Tanggapan responden tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk 4 indikator dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pertanyaan pada masing-masing indikator pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah :

1) Pengidentifikasian

Dalam indikator ini, terdapat satu item pertanyaan yang diajukan. Hasil tanggapan responden terkait indikator Relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Tanggapan Responden Indikator Pengidentifikasian

No. Angket	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
			5	4	3	2	1			
1	Selama ini Bapak/Ibu sebelum melakukan proses penjurnalan melakukan identifikasi transaksi terlebih dahulu.	F	18	12	2	1	0	146	146/165= **88.5%**	Sangat Baik
		%	55	36	6	3	0	100%		

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017

Indikator ini mendapat tanggapan yang Sangat Baik, dengan item pernyataan hal ini berarti implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam hal pengidentifikasian transaksi telah sangat baik dilakukan oleh SKPD di Kota Cimahi.

2) Pengukuran

Dalam indikator ini, terdapat dua item pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil tanggapan responden terkait indikator ini, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Tanggapan Responden Indikator Pengukuran

No. Angket	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
			5	4	3	2	1			
2	Selama ini Bapak/Ibu dalam mencatat transaksi. (diukur dalam satuan ekonomi)	F	5	3	13	12	0	100	100/165= **60.6%**	Cukup
		%	15	9	39	36	0	100%		
3	Selama ini Bapak/Ibu ketika mencatat transaksi ekonomi,	F	5	1	19	7	1	101	101/165= **61.2%**	Cukup
		%	15	3	58	21	3	100%		
Total									**60.9%**	**Cukup**

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017

Indikator ini mendapat kategori skor Cukup dengan item pernyataan nomor 3 mendapat kategori tanggapan Cukup, yang berarti dalam pencatatan transaksi, kadang-kadang dapat diukur dengan nilai ekonomi. Dan item pernyataan nomor 3 mendapatkan tanggapan yang Cukup juga, yang ketika mencatat transaksi ekonomi, SKPD di Kota Cimahi kadang-kadang disesuaikan dengan bukti transaksinya.

3) Pencatatan

Dalam indikator ini, terdapat dua item pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil tanggapan responden terkait indikator ini, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Tanggapan Responden Indikator Pencatatan

No. Angket	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
			5	4	3	2	1			
4	Selama ini Bapak/Ibu ketika terjadi transaksi (Waktu pencatatan).	F	11	8	10	4	0	125	125/165= **75.8%**	Baik
		%	33	24	30	12	0	100%		
5	Selama ini Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaanterkait pencatatan transaksi ekonomi (Kelengkapan pencatatan).	F	4	11	15	3	0	112	112/165= **69.7%**	Baik
		%	12	33	45	9	0	100%		
Total									**72.7%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017

Indikator ini mendapat kategori skor Baik dengan item pernyataan nomor 4 mendapat tanggapan Baik, yang berarti saat terjadi transaksi selalu langsung dilakukan pencatatan, sesuai dengan prinsip SAP yang memakai standar akuntansi berbasis akrual. Dan item pernyataan nomor 5 mendapatkan tanggapan yang Baik

juga, yang menandakan bahwa setiap pencatatan transaksi ekonomi sudah sangat lengkap pencatatannya.

4) Pelaporan

Tabel 4.9
Hasil Tanggapan Responden Indikator Pelaporan

No. Angket	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
			5	4	3	2	1			
6	Selama ini ketika Bapak/Ibu ketika membuat laporan keuangan. (Kesesuaian dengan aturan)	F	1	7	6	9	10	79	79/165= **47.9%**	Kurang
		%	3	21	18	27	30	100%		

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017

Hasil penelitaian yang menunjukan indikator pelaporan mendapat kategori tanggapan Kurang, hal ini berarti dalam pelaporan laporan keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kota Cimahi masih tidak sesuai dengan aturan atau SAP.

Hasil tanggapan responden untuk variabel ini menjawab fenomena yang terjadi di lapangan pada pembahasan sebelumnya. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian Cimahi, Nono menyatakan bahwa pelaporan keuangan, dokumen–dokumen perencanaan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Strategi (renstra) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

4.1.2.2 Analisis Desktiptif Akuntabilitas Keuangan (X_2)

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Yang menjadi indikator pada penelitian ini untuk variabel Akuntabilitas Keuangan adalah Integritas Keuangan, Pengungkapan dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan. Skor untuk penilaian responden terhadap indikator variabel Akuntabilitas Keuangan yang di aplikasikan kedalam 3 pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Akuntabilitas Keuangan(X_2)

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
7	Integritas Keuangan	102	165	61.8%	Cukup
8	Pengungkapan	78	165	47.3%	Kurang
9	Ketaatan Terhadap Perundang-undangan	106	165	64.2%	Cukup
TOTAL		**286**	**495**	**57.8%**	**Cukup**

Sumber: Data primer sudah diolah 2017

Pada tabel 4.10 di atas dapat dilihat rata-rata persentase tanggapan untuk variabel Akuntabilitas Keuangan sebesar 57.8%, menurut tabel 3.4 angka tersebut termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01 % - 68,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 42.2%, Gap sebesar 42.2% ini menunjukan penyebab Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Cimahi

belum mencapai tingkat ideal. Dan yang menjadi kekurangan paling besar menurut penelitian ini adalah pada indikator Pengungkapan.

Hasil tanggapan responden mengenai Akuntabilitas Keuangan untuk 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pertanyaan pada masing-masing indikator pada variabel Akuntabilitas Keuangan berikut:

Tabel 4.11
Hasil Tanggapan Variabel Akuntabilitas Keuangan

No. Angket	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
			5	4	3	2	1			
7	Selama ini Bapak/Ibu ketika menyajikan laporan keuangan daerah.	F	3	5	17	8	0	102	102/165= **61.8%**	Cukup
		%	9	15	52	24	0	100%		
8	Selama ini Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan.	F	2	4	9	7	11	78	78/165= **47.3%**	Kurang
		%	6	12	27	21	33	100%		
9	Selama ini Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan. pembuatan laporan keuangan	F	4	8	13	7	1	106	106/165= **64.2%**	Cukup
		%	12	24	39	21	3	100%		

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017

1) Integritas Keuangan (Nomor angket 7)

Dalam indikator Integritas keuangan mendapat kategori tanggapan yang Cukup, hal ini berarti ketika menyajikan laporan keuangan daerah pegawai di SKPD Kota Cimahi cukup mempertahankan integritas keuangannnya.

2) Pengungkapan (Nomor angket 8)

Indikator ini mendapat hasil tanggapan yang Kurang, hal ini menandakan tidak selalu terlampirnya bukti pertanggungjawaban dalam melakukan pekerjaan.

Hasil ini senada dengan permasalahan yang dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi, Sudiarto terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah memperoleh nilai 50,27 atau predikat "CC" yang salah satunya di sebabkan karena saat merealisasikan belanja daerah belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

3) Ketaatan terhadap perundang-undangan

Indikator ini mendapat kategori skor Cukup yang berarti perarturan dalam pembuatan laporan keuangan kadang-kadang ditaati dalam menjalankan pekerjaan.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Variabel inii diimplementasikan kedalam 4 pernyataan kuesioner dengan rata-rata skor penilian responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Rata-rata Skor Penilaian Responden Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
10	*Input*	114	165	69.1%	Baik
11	*Process*	119	165	72.1%	Baik
12	*Output*	114	165	69.1%	Baik
13	*Outcomes*	72	165	43.6%	Kurang
TOTAL		**419**	**660**	**63.5%**	**Cukup**

Sumber: Data primer sudah diolah 2017

Pada tabel 4.12 dapat diketahui rata-rata persentase tanggapan untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 63.5%, menurut tabel 3.4 angka tersebur termasuk kategori Cukup karena berada pada interval 52,01 % - 68,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 36.5%. Gap sebesar 36.5% ini menunjukan penyebab Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Cimahi belum mencapai tingkat ideal. Yang menjadi kelemahan utama untuk variable ini adalah indikator *Outcomes* atau hasil.

Hasil tanggapan responden mengenai Kinerja Instansi Pemerintah untuk 4 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan akan diuraikan dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut merupakan tanggapan responden berdasarkan butir pertanyaan pada masing-masing indikator pada variabel Kinerja Instansi Pemerintah , berikut:

Tabel 4.13
Hasil Tanggapan Variabel Kinerja Instansi Pemerintah

No. Angket	Pertanyaan		Alternatif jawaban yang diberikan					Skor aktual	% tanggapan (skor aktual/skor ideal)	Kategori
			5	4	3	2	1			
10	Selama ini Bapak/Ibu saat menjalankan pekerjaan, membutuhkan pendanaan untuk dikelola di instansi	F	5	5	23	0	0	114	114/165= **69.1%**	Baik
		%	15	15	70	0	0	100%		

	pemerintah.									
11	Selama ini Bapak/Ibu saat menjalankan pekerjaan, menyangkut pendanaan.	F	5	11	16	1	0	119	119/165= **72.1%**	Baik
		%	15	33	48	3	0	100%		
12	Selama ini ditempat Bapak/Ibu bekerja (Terkait pengelolaankeuangan).	F	6	10	10	7	0	114	114/165= **69.1%**	Baik
		%	18	30	30	21	0	100%		
13	ketika menjalankan pekerjaan melakukan pengelolaan dana supaya mendapat nilai memuaskan menyangkut kinerja instansi	F	0	4	11	5	13	72	72/165= **43.6%**	Kurang
		%	0	12	33	15	39	100%		

Sumber: Data primer yang telah diolah 2017

1) *Input*

Dalam indikator *input* mendapat kategori tanggapan yang Baik, hal ini berarti dalam menjalankan pekerjaan, membutuhkan pendanaan untuk dikelola di instansi pemerintah.

2) *Process*

Indikator ini mendapat hasil tanggapan yang Baik, hal ini menandakan dalam menjalankan pekerjaan dibutuhkan pendanaan dalam menjalankan operasional kerja.

3) *Output*

Indikator ini mendapatkan katogeri tanggapan yang baik, hal ini berarti dalam pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan, meningkatkan kinerja instansi pemerintah di Kota Cimahi.

4) *Outcomes*

Indikator ini mendapat kategori skor Kurang yang berarti ketika menjalankan pekerjaan, pegawai tidak melakukan pengelolaan dana supaya mendapat nilai memuaskan menyangkut kinerja instansi pemerintah.

4.1.3 Pengujian Alat Analisis

Data penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dalam skala ordninal. Maka sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut terlebih dulu harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengethui sejauh mana kevalidan dan reliabelnya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.3.1 Uji Validitas

Sebelum menguji pengaruh antar variabel terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Pengujian validitas menggunakan nilai korelasi skor item dengan skor total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan *Pearson product moment*. Validitas digunakan untuk membuktikan kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*).

Butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai *pearson correlation* nya lebih dari nilai r_{tabel} dalam penelitian ini nilai r_{tabel} adalah 0.344 (Signifikansi 5% & 33 responden), berikut hasil pengujian validitas alat analisis pada penelitian ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Kuesioner	*Pearson Corelation*	r_{tabel}	Kesimpulan
X_1	1	0.704	0.344	Valid
	2	0.808	0.344	Valid
	3	0.830	0.344	Valid

	4	0.710	0.344	Valid
	5	0.717	0.344	Valid
	6	0.695	0.344	Valid
X_2	7	0.837	0.344	Valid
	8	0.881	0.344	Valid
	9	0.825	0.344	Valid
Y	10	0.728	0.344	Valid
	11	0.661	0.344	Valid
	12	0.809	0.344	Valid
	13	0.831	0.344	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah dengan IBM SPSS Statistics V.24 2017

Hasil uji validitas menunjukkan semua item memiliki nilai nilai *pearson correlation* >0.344 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Akuntabilitas Keuangan (X_2) dan item Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah valid.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas untuk masing masing butir pernyataan kuesioner dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menguji apakah kuesioner telah mengukur dengan cermat dan tepat apa yang hendak diukur. Pengujian reliabilitaspada penelitian ini menggunakan metode *Split Half* dimana kuesioner dinyatakan *reliable* apabila hasil output perhitungan *Split Half* nya lebih dari nilai rt_{abel} yaitu 0.344 (signifikansi 5%, responden 33).

Pada pengujian reliabitas menggunakan metode *Split Half*, dapat dilihat pada output IBM SPSS STATISTICS V.24 berikut ini:

Tabel 4.15
Output Reliabilitas Variabel SAKD (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.816
		N of Items	3[a]
	Part 2	Value	.645
		N of Items	3[b]
	Total N of Items		6
Correlation Between Forms			.666
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.799
	Unequal Length		.799
Guttman Split-Half Coefficient			.799

a. The items are: 1, 2, 3.

b. The items are: 4, 5, 6.

Dari Hasil output Spss didapat nilai *Split Half* sebesar 0.799, nilai ini kita bandingkan dengan nilai r_{tabel} 0.344 (signifikansi 5%, responden 33). Karena nilai *Split Half* 0.799> nilai r_{tabel} 0.344 maka dapat dikatakan item-item tersebut reliabel.

Tabel 4.16
Output Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Keuangan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.742
		N of Items	2[a]
	Part 2	Value	1.000
		N of Items	1[b]
	Total N of Items		3
Correlation Between Forms			.617
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.763
	Unequal Length		.780
Guttman Split-Half Coefficient			.677

a. The items are: 7, 8.

b. The items are: 8, 9.

Dari Hasil output Spss didapat nilai *Split Half* sebesar 0.677 nilai ini kita bandingkan dengan nilai r_{tabel} 0.344 (signifikansi 5%, responden 33). Karena nilai *Split Half* 0.677 lebih besar nilai r_{tabel} 0.344 maka dapat dikatakan item-item tersebut reliabel.

Tabel 4.17
Output Reliabilitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.533
		N of Items	2[a]
	Part 2	Value	.714
		N of Items	2[b]
	Total N of Items		4
Correlation Between Forms			.583
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.736
	Unequal Length		.736
Guttman Split-Half Coefficient			.702

a. The items are: 10, 11.

b. The items are: 12, 13.

Dari Hasil output Spss didapat nilai *Split Half* sebesar 0.702, nilai ini kita bandingkan dengan nilai rtabel 0.344 (signifikansi 5%, responden 33). Karena nilai *Split Half* 0.702>nilai r_{tabel} 0.344 maka dapat dikatakan item-item tersebut reliabel.

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

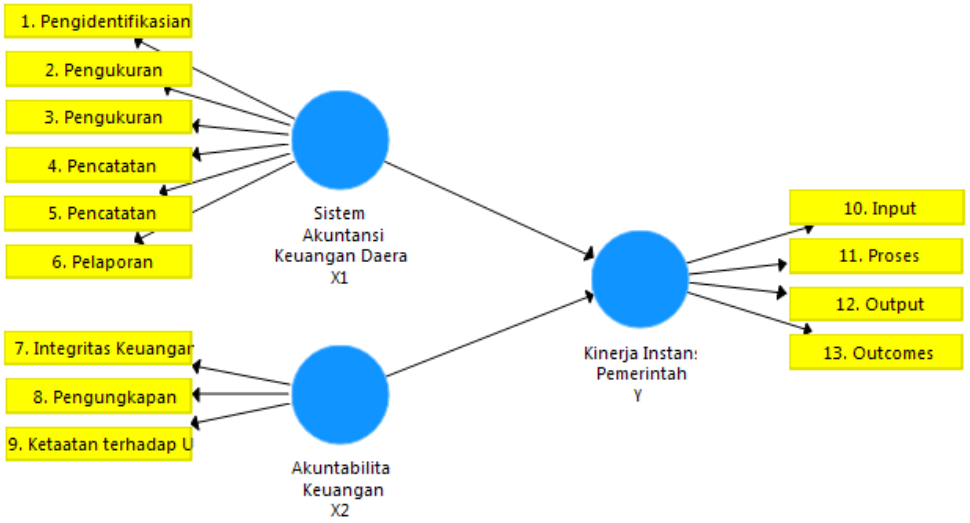
Tahapan pengujian pengaruh dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka selanjutnya dilakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah *structural equation modeling* (SEM)

dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.2.6.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model structural (*inner model*). Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel *manifes* (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

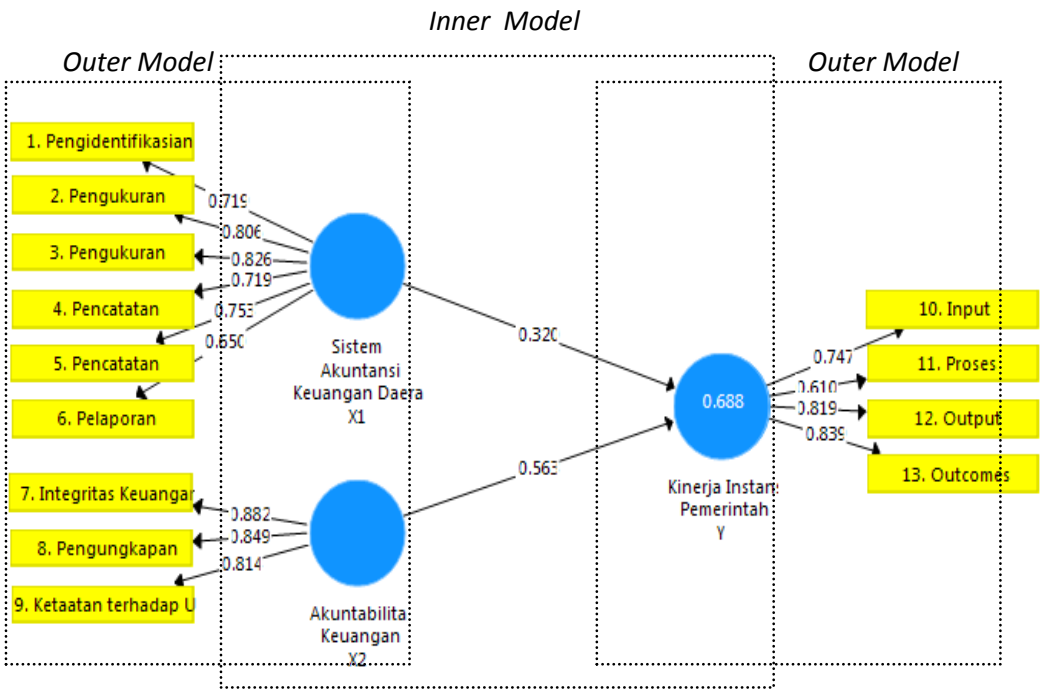
Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 13. Variabel laten Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) 4 variabel manifes, Akuntabilitas Keuangan (X_2) 3 variabel manifes dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 4 variabel manifes.

Menggunakan metode estimasi *Partial Least Square* diperoleh diagram jalur *full model* pengaruh SAKD Dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah seperti pada gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.4
Model Penelitian

Hasil output perhitungan dari keseluruhan model diagram jalur menggunakan *SmartPLS v.3.2.6* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5
Model Diagram Jalur Lengkap

Pengujian hasil *Struktural Equation Modeling* dengan menggunakan pendekatan PLS dilakukan dengan melihat model pengukuran (*Outer Model*) dan hasil model struktural (*Inner Model*) dari model yang diteliti.

4.1.4.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukuran ini digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan variabel manifesnya, pengujian ini meliputi *convergent validity*, *discriminant validity* dan reliabilitas. Berikut pengujiannya:

1) *Convergent Validity* dan Reliabilitas

Convergent validity ini berhubungan dengan prinsip bahwa variabel *manifest* (indikator) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan *SmartPLS v.3.2.6,* dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* dieavaluasi dalam 3 tahap, yaitu;

a) Validitas Indikator

Jika nilai *loading factor* antara 0,5-0,6 atau lebih maka dikatakan cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai t_{hitung} harus lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu *2.042*(df 33-2-1=30, sig=5%). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *SmartPLS .3.2.6,* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18
***Loading Factor* Indikator Variabel**
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

Nomor Kuesioner	Variabel Manifes	*Loading Factor*	t_{hitung}	Keterangan
1	Pengidentifikasian	0.719	7.388	Valid
2	Pengukuran	0.806	14.120	Valid
3		0.826	12.241	Valid
4	Pencatatan	0.719	8.396	Valid
5		0.753	8.667	Valid
6	Pelaporan	0.650	4.069	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Dari tabel 4.18 di atas memberikan informasi mengenai nilai *Loading Factor* untuk setiap variabel manifest dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pada tabel tersebut terlihat nilai *Loading Factor* paling tinggi ada pada variabel manifest dengan nomor kuesioner 2 dan 3 yaitu diatas 0.800 yang berarti variabel manifest ini mempunyai korelasi paling tinggi terhadap variabel konstruk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan untuk nilai t_{hitung} semua variabel manifest memiliki nilai t_{hitung} diatas *2.042* menandakan variabel manifest tersebut sahih/valid dan keenam variabel manifest tersebut dapat mengukur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Semua variabel manifest memiliki hubungan yang positif/searah terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Tabel 4.19
***Loading Factor* Indikator Variabel Akuntabilitas Keuangan (X_2)**

Nomor Kuesioner	Variabel Manifes	*Loading Factor*	t_{hitung}	Keterangan
7	Integritas Keuangan	0.882	17.297	Valid
8	Pengungkapan	0.849	11.656	Valid
9	Ketaatan terhadap UU	0.814	9.728	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Tabel 4.19 di atas meberikan informasi mengenai nilai *Loading Factor* untk setiap variabel manifest dari Akuntabilitas Keuangan .

Semua variabel manifest pada Akuntabilitas Keuangan memiliki arah hubungan yang positif. Semua item memiliki *Loading Factor* diatas 0.700 sehingga dapat dikategorikan tinggi, semua nilai t_{hitung} diatas *2.042* menandakan variabel manifest tersebut sahih/valid. Hasil tersebut menunjukan bahwa penggunaan ketiga variabel manifest tersebut dinyatakan mampu untuk mengukur variabel Akuntabilitas Keuangan secara tepat.

Tabel 4.20
***Loading Factor* Indikator Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Nomor Kuesioner	**Variabel Manifes**	***Loading Factor***	**t_{hitung}**	**Keterangan**
10	*Input*	0.747	6.347	Valid
11	*Process*	0.610	3.964	Valid
12	*Output*	0.819	13.169	Valid
13	*Outcomes*	0.839	15.381	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Dari tabel 4.20 di atas memberikan informasi mengenai nilai *Loading Factor* untuk setiap variabel manifest dari Kinerja Instansi Pemerintah. Semua variabel manifest pada Kinerja Instansi Pemerintah semuanya memiliki arah hubungan yang positif/searah dan memiliki nilai t_{hitung} diatas *2.042* dan nilai *Loading Factor* di atas 0.500 menandakan variabel manifest tersebut sahih/valid. Hasil tersebut menunjukan bahwa penggunaan keempat variabel manifest tersebut dinyatakan mampu untuk mengukur variabel Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat.

b) Reabillitas Konstruk

Dilihat dari nilai output *Composite Reability* (CR). Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai CR ≥ 0,7 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari nilai r_{tabel} 0.344.

Tabel 4.21
Reabilitas Konstruk

Variabel Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0.840	0.883
Akuntabilitas Keuangan (X2)	0.806	0.885
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.756	0.843

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai *Composite Reliability* dari ketiga variabel konstruk adalah $\geq$ 0.7 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari nilai 0.344, sehingga dapat dikatakan semua indikator konstruk mendapat kriteria yang reliabel atau dengan kata lain seluruh variabel manifest dari ketiga variabel laten terbukti layak dijadikan untuk mengukur konstruk dengan baik.

c) *Average Variance Extracted* (AVE)

Nilai *average variance extracted* (AVE) yang diharapkan adalah lebih dari nilai 0.500.

Tabel 4.22
***Average Variance Extracted* (AVE)**

Variabel Konstruk	*Average VarianceExtracted* (AVE)
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0.559
Akuntabilitas Keuangan (X2)	0.720
Kinerja Instansi Pemerintah(Y)	0.576

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Jika dilihat dari nilai AVE di atas setiap variabel melebihi batas yang ditentukan yakni $\geq$ 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013). dengan demikian seluruh variabel manifest mengenai Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah (X_1), Akuntabilitas Keuangan (X_2) dan Kinerja Instansi Pemerintah(Y) memiliki validitas yang baik.

2) *Discriminant Validity*

Discriminant validity dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Yamin, 2009:222). Nilai *cross loadings factor* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Uji *Cross Loading Factor*

Nomor Kuesioner	Var.	SAKD (X_1)	Akuntabilitas Keuangan (X_2)	Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
1	X_1	0.719	0.445	0.484
2		0.806	0.626	0.579
3		0.826	0.498	0.577
4		0.719	0.611	0.565
5		0.753	0.676	0.598
6		0.650	0.439	0.525
7	X_2	0.808	0.882	0.767
8		0.584	0.849	0.648
9		0.462	0.814	0.610
10	Y	0.561	0.520	0.747
11		0.297	0.397	0.610
12		0.544	0.705	0.819
13		0.743	0.731	0.839

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai *cross loading* untuk setiap indikator (kolom yang *highlights*) lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi indikator

dengan variabel laten yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Tabel 4.24
Hasil Uji Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	Akar AVE
X_1	0.748
X_2	0.849
Y	0.759

	Y	X1	X2
Y	1.000		
X_1	0.739	1.000	
X_2	0.801	0.743	1.000

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.6 2017

Pada tabel di atas, terlihat nilai akar AVE untuk setiap variabel tidak jauh dari nilai korelasi antar variabel laten, bahkan cenderung lebih besar sehingga variabel laten dinyatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ukuran *cross loadings* maupun perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* telah terpenuhi.

4.1.4.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural (*inner model*) dapat dilihat dari nilai R_{Square} untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen.

1) Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi menunjukan keeratan hubungan antara variabel laten *eksogen* dengan variabel laten *endogen*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *software SmartPLS* v.3.2.6, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.25
Koefisien Korelasi

Variabel Laten	Korelasi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)>Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.737
Akuntabilitas Keuangan (X_2) >Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.801

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4 2017

a) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 0.737, berdasarkan pada tabel 3.7, angka tersebut termasuk dalam kategori Kuat/Erat karena berada pada interval 0.600-0.799. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berjalan dengan cukup baik maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

b) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Akuntabilitas Keuangan (X_2) dengan Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 0.801, berdasarkan pada tabel 3.7 angka tersebut termasuk dalam kategori Sangat kuat/Sangat Erat karena berada pada interval 0.800-1.00 nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika semakin baiknya Akuntabilitas Keuangan maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukan besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel laten eksogen terhadap variabel laten

endogen. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perangkat lunak bantuan *SmartPLS v.3.2.6*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.26
Koefisien Determinasi

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)>Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.688
Akuntabilitas Keuangan (X_2) >Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4 2017

Pada tabel 4.31 di atas, terlihat nilai R_{Square} yang diperoleh adalah sebesar 0,688 atau 68.8%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Akuntabilitas Keuangan (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 68.8% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), sedangkan sebanyak (1-R_{Square}) 31.2% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27
Pengaruh Variabel Laten *Eksogen* terhadap Variabel Laten *Endogen*

			X_1	X_2	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)>Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.320	0.320^2=10.2%		13.43	23.67%
Akuntabilitas Keuangan (X_2) >Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.563	0.563^2=31.7%	13.43		45.13%
				Total	**68.80%**

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4 2017

Nilai-nilai yang tersaji pada tabel 4.26 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh secara parsial sebesar 23.67% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian 10.2% pengaruh langsung dan 13.43% merupakan pengaruh tidak langsung melalui Akuntabilitas Keuangan .
b) Akuntabilitas Keuangan memberikan pengaruh secara parsial sebesar 45.13% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian 31.7% pengaruh langsung dan 13.41% merupakan pengaruh tidak langsung melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka t_{tabel} adalah *2.042* (df=33-2-1=30).

4.1.4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diduga akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk membuktikan kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

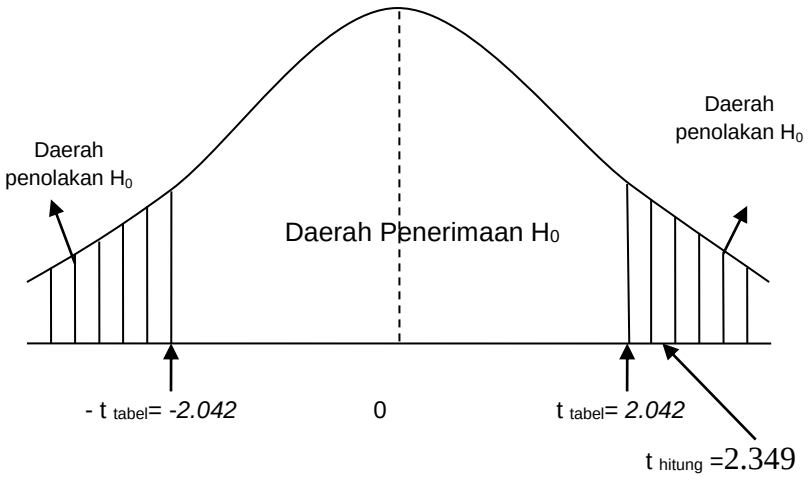
Ho: $\gamma 1 = 0$, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H_1: $\gamma 1 \neq 0$, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 4.28
Uji *t* Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_1>Y	0.320	2.349	*2.042*	H_0 Ditolak	Signifikan

Pada tabel 4.27 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.349>*2.042*(t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.6
Daerah Penerimaan Hipotesis X_1>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.349 berada didaerah penolakan Ho (t_{hitung}>t_{tabel}) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut

menunjukan bahwa Sistem Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.4.3.2 Akuntabilitas Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas Keuangan diduga akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk membuktikan kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

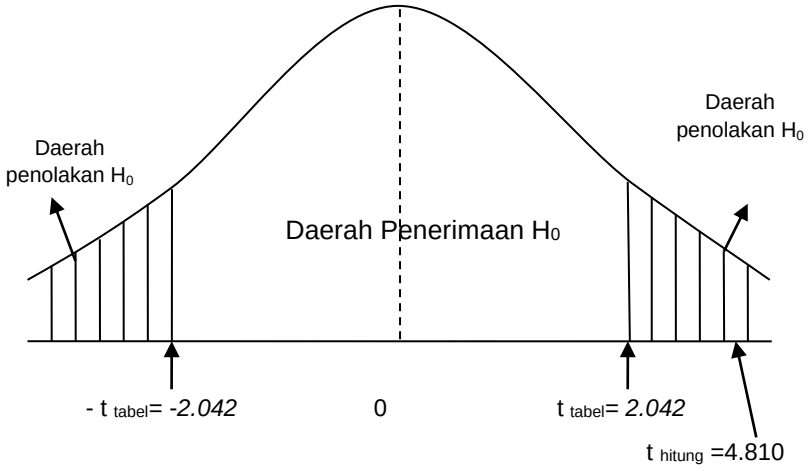
Ho: $\gamma 2 = 0$, Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

H_1: $\gamma 2 \neq 0$, Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4.29
Uji *t* Pengaruh Akuntabilitas Keuangan(X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_2>Y	0.563	4.810	*2.042*	$H_{0\ Ditolak}$	Signifikan

Pada tabel 4.28 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 4.810>*2.042* (t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan Hipotesis X_2>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 4.810 berada didaerah penolakan Ho (t_{hitung}>t_{tabel}) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memberikan pengaruh sebesar 23.67%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Kuat yaitu sebesar 0.737. t_{hitung} diperoleh sebesar 2.349, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} *2.042*, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah di SKPD Kota Cimahi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti semakin baik implementasi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan membuat Kinerja Instansi Pemerintah semakin baik pula.

Dalam penelitian ini kedua variabel ini belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 32.3% untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan 36.5% untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dapat mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil tanggapan responden, yang menjadi kekurangan utama dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah indikator Pelaporan.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:27) menyatakan terdapat hubungan antara sistem akuntansi sektor publik dan kinerja pemerintah daerah, dalam lingkup pengelolaan keuangan negara atau penganggaran sektor publik, sistem akuntansi diperlukan pada tahap pelaksanaan, kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem akuntansi sektor publik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya menurut Wawan Sukmana (2009) yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh penelitian Mukmin dkk (2015) menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur SKPD. Pendapat serupa juga didukung oleh penelitian Novita Lerly Djiloy (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi, menurut Kasubag Umum Dan Kepegawaian Cimahi, Nono menyatakan bahwa pelaporan keuangan, dokumen–dokumen perencanaan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Strategi (renstra) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal ini membuat kinerja Instansi menurun. Dalam penjelasan tersebut dapat dilihat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah khususnya dalam pelaporan keuangan, dokumen-dokumen perencanaan kerja RPJMD dan RENSTRA yang masih memiliki permasalahan karena tidak sesuai dengan aturan yg ditetapkan membuat Kinerja Instansi Pemerintah Menurun, ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukan hubungan positif antara SAKD dengan kinerja instansi.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memberikan pengaruh sebesar 45.13%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Sangat Kuat yaitu sebesar 0.801 (0.800-1.00). t_{hitung} diperoleh sebesar 4.810, nilai ini lebih

besar dari pada t_{tabel} *2.042*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti Akuntabilitas Keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah SKPD di Kota Cimahi. Akuntabilitas Keuangan memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan semakin baiknya Akuntabilitas Keuangan maka akan membuat Kinerja Instansi Pemerintah SKPD di Kota Cimahi semakin baik pula.

Dalam penelitian ini Akuntabilitas Keuangan belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 42.2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Keuangan belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Akuntabilitas Keuangan di SKPD di Kota Cimahi, terutama dalam indikator Pengungkapan.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:124) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan, tolak ukur kinerja tersebut berupa pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan, akuntabilitas keuangan yang baik akan meningkatkan penilaian kinerja di dalam instansi pemerintah untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya menurut menurut Lucy Auditya (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Selanjutnya

penelitian dilakukan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi di Dinas SKPD Kota Cimahi, menurut Kasubag Umum Dan Kepegawaian Cimahi, Nono menyatakan ada beberapa Dinas SKPD pada saat merealisasikan belanja daerah belum didukung bukti pertanggung jawaban yang lengkap, sehingga instansi belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengaruh yang terlihat di fenomena yang dikemukaan oleh Nono adalah di beberapa SKPD saat merealisasikan belanja daerah untuk bukti pertanggungjawabannya belum lengkap, pengelolaan pada saat merealisasikan belanja daerah yang belum optimal akan membuat instansi pemerintah belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah.